

PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK USIA DINI

Oleh: Suparno*)

Abstrak

Sebagai suatu model pendekatan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif telah menjadi kajian yang menarik di Indonesia pada dekade terakhir ini. Hal ini nampak dari adanya perhatian pemerintah dan masyarakat yang semakin serius untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam berbagai bentuk kebijakan dan fasilitas pendukungnya.

Kendati demikian, implementasi pendidikan inklusif pada umumnya masih terfokus pada anak-anak usia sekolah (dasar dan lanjutan), dan belum banyak menyentuh pada anak-anak usia pra-sekolah (usia dini). Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang berbagai kemungkinan pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus usia dini, dalam praksis pendidikan di sekolah.

Kata kunci : Inklusi Anak Usia Dini

Pendahuluan

Pertanyaan yang segera dapat dengan mudah kita temukan jawabannya adalah tentang dimana anak-anak berkebutuhan khusus belajar, hampir semua orang yang ditanya dipastikan akan menjawab bahwa mereka belajar di sekolah luar biasa. Tidak ada lagi alternatif tempat lain yang umumnya mereka ketahui, di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar dan menimba ilmu pengetahuan misalnya di sekolah umum. Pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia memang sudah terbangun sejak lama, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak normal sehingga belajarnya pun pasti juga berbeda dan seharusnya mendapatkan pendidikan dan bersosialisasi dengan teman-teman yang senasip.

*) *Dosen Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UNY*

Persepsi masyarakat yang demikian ini merupakan kondisi yang sulit, jauh lebih sulit daripada mendidik anak-anak berkebutuhan itu sendiri, apabila hal ini dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi secara sungguh-sungguh.

Memang, pendidikan inklusif pada dekade terakhir ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang berarti dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kondisi ini, tidak lepas dari pengaruh positif hasil konferensi dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien Thailand (1990), yang bertujuan untuk membawa anak masuk sekolah, dan memberikan semua anak pendidikan yang sesuai. Suatu konsep dan perubahan mengenai pendidikan inklusi yang juga dipertegas dalam pernyataan Salamanca (1994) yang diformulasikan berorientasi pada pelayanan pendidikan untuk semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan inklusi.

Sejauh ini konsep dan *statement* tersebut memang telah membuka kesadaran dan wawasan akan pentingnya *mainstreaming* dalam pelayanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, mereka yang memiliki kesadaran dan wawasan demikian jauh lebih sedikit dibanding masyarakat kita yang ratusan juta, yang tentu sebagian besar belum memiliki pengetahuan dan kesadaran ataupun persepsi positif mengenai pendidikan inklusi. Apalagi mereka yang sedikit itu juga tidak mampu menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam upaya pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Bukan hanya masyarakat umum, sekolah-sekolah reguler yang ada sekarang saja hanya sebagian kecil yang dengan suka rela bersedia menyelenggarakan pendidikan

inklusi, banyak diantara mereka yang belum mau membuka diri terhadap kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus secara apa adanya. Tentu hal demikian disertai dengan berbagai alasan yang diciptakan, yang secara akademis dan administratif memungkinkan untuk dapat diterima semua pihak yang terkait.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003) pada penjelasan pasal 15 alinea terakhir menyebutkan, bahwa Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ini secara nyata menunjukkan adanya landasan filosofis ataupun yuridis yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif di Indonesia. Namun demikian, komitmen untuk melaksanakan di tataran operasional lapangan tidak mudah, banyak kendala yang muncul berkenaan dengan kebijakan, sumber daya, teknis ataupun fasilitas yang tersedia. Keanekaragaman anak-anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan juga menjadikan permasalahan tersendiri di lapangan,

Satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana inklusi dapat mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus usia dini? mengingat sampai saat ini anak-anak tersebut masih belum mendapatkan perhatian yang serius dalam memperoleh hak pendidikannya. Tulisan ini secara singkat akan membahas tentang hal-hal tersebut secara kualitatif, dari beberapa sisi kebijakan dan operasional pendidikan di sekolah.

Pendidikan Inklusif

Kenyataan, bahwa anak-anak kita itu beraneka ragam, kondisi, karakteristik dan budayanya. Diantara mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus, di mana masyarakat umum, atau di lingkungan Departemen Sosial sering kali menyebutnya sebagai penyandang cacat (*disability*) atau memiliki hambatan (*handicap*). Dua istilah yang menurut Smith (2006) sangat berbeda maknanya, *disability* adalah keadaan aktual fisik, mental, dan emosi, seperti misalnya orang-orang yang tunanetra atau tunarungu, yang tidak memiliki kemampuan melihat atau mendengar. Sedang *handicap* adalah keterbatasan yang terjadi pada individu akibat adanya *disability*. Keterbatasan yang demikian sering kali terjadi karena adanya anggapan daripada kebutuhan yang obyektif. Sebutan istilah (*labeling*) yang ada juga seringkali dilatarbelakangi oleh kepentingan atau kebijakan tertentu dalam pengembangan program ataupun situasi sosial budaya masyarakat setempat.

Secara fisik, mental, ataupun emosi memang terjadi perbedaan diantara anak-anak, namun dari perbedaan-perbedaan itu akan dapat digali dan temukan persamaannya. Artinya, bahwa pada anak-anak berkebutuhan khusus itu atau sisi kebutuhan mereka yang sama dengan kebutuhan anak-anak pada umumnya, terutama adalah kebutuhan dalam memperoleh pendidikan. Hal yang demikian ini sesungguhnya telah lama dipikirkan oleh para ahli melalui program pembelajaran *mainstreaming*, yang mencoba mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal dalam proses pembelajaran di sekolah dengan fokus

utama adalah integrasi fisik, sosial, emosi, dan intelektual nya. Perkembangan untuk memperjuangkan kebersamaan ini ternyata tidak berhenti pada *mainstreaming*, tetapi terus berlanjut dan berkembang pada konsep dan program pendidikan inklusi, kendati diantara keduanya memiliki prinsip yang berbeda dalam prosesnya, namun tetap dalam koridor kebersamaan. Fuchs, (Smith, 2006), menjelaskan inklusi dapat (dan mempunyai) arti yang berbeda-beda bagi tiap orang. Beberapa orang menerjemahkannya sebagai cara baru untuk berbicara tentang *mainstreaming*. Bagi yang lainnya mungkin dilihat sebagai inisitif pendidikan reguler dengan label baru. Sebagian bahkan menggunakan istilah inklusi sebagai *banner* untuk menyerukan "*full inclusion*" atau "*uncompromising inclusion*" yang berarti penghapusan pendidikan khusus.

Inklusi dalam tujuan ini adalah pemberian pengajaran yang dirancang secara khusus serta bantuan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam konteks lingkungan pendidikan reguler. Ini berarti, bahwa semua siswa yang masuk dalam lingkungan sekolah sepenuhnya menjadi anggota komunitas sekolah, dan satu sama lain saling berpartisipasi secara wajar untuk untuk mendapatkan kesempatan dan bertanggung jawab dalam lingkungan pendidikan secara umum.

Konsekuensi dari konsep ini, inklusi berupaya memahami bahwa kelas/sekolah menjadi lebih dan lebih bervariasi lagi, dan ini menjadi tugas guru untuk merancang program pembelajaran yang bermanfaat bagi semua siswa, berdasarkan kondisi masing-masing yang berbeda pula. Sebagai konsep atau pendekatan yang dikembangkan dalam upaya pelayanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, inklusi dalam tataran operasional masih dianggap rancu

dengan konsep terpadu, yang lebih dahulu hadir dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Secara konseptual antara pendidikan inklusif dan pendidikan terpadu (*mainstreaming*), nampak sekali adanya persamaan dan perbedaan yang prinsip. Secara umum di dalam pendidikan inklusif ditandai dengan adanya siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah umum, meskipun dengan cara-cara atau pendekatan yang berbeda. Sedang dilihat dari bentuk pelayanannya, keduanya menunjukkan perbedaan yang sangat prinsip. Konsep *mainstreaming* atau integrasi, dimana siswa berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada pada institusi atau lembaga tempat belajarnya. Sebaliknya inklusi, dimana sistem suatu institusi atau lembaga yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, integrasi lebih berfokus pada kurikulum dan diatur oleh guru, sedangkan inklusi berpusat pada siswa, dan dikembangkannya interaksi yang komunikatif dan dialogis.

Dari uraian tersebut sesungguhnya dikemukakan, bahwa konsep inklusif lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif menurut Sapon-Shevin dalam O'Neil, John (1994:1) didefinisikan sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Untuk itu perlu adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak. Sejalan dengan konsep ini.

Gagasan utama mengenai pendidikan inklusif ini menurut Johnsen (2003:181), adalah :

- a. Bahwa setiap anak merupakan bagian integral dari komunitas lokalnya dan kelas dan kelompok reguler.
- b. Bahwa kegiatan sekolah diatur dengan sejumlah besar tugas belajar yang kooperatif, individualisasi pendidikan dan fleksibilitas dalam pilihan materinya.
- c. Bahwa guru bekerjasama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai tentang pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas.

Pendidikan inklusi mempercayai bahwa semua anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia atau perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi, ataupun kelainannya. Penting bagi guru untuk disadari, bahwa di sekolah mereka dapat membuat penyesuaian pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, manakala mereka memiliki pandangan pendidikan yang komprehensif, yang terpusat pada anak. Meskipun mungkin masih memerlukan pelatihan tentang metode atau strategi khusus yang akan diterapkan di sekolah.

Kesadaran tersebut juga perlu dibangun, terutama berkenaan dengan pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Ini didasari atas pertimbangan, bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi dan

kebutuhannya. Mereka juga memiliki hak untuk belajar bersama dengan teman-teman sebayanya. Hanya saja, sampai saat ini pun mereka para guru dan staf sekolah masih sedikit yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini sebuah tantangan dan sekaligus ironi, bahwa telah banyak peraturan atau perundangan dibuat, namun tidak juga dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Implementasi Pendidikan Inklusif pada Anak Usia Dini

Sesungguhnya masih banyak kontroversi dikalangan profesional dan masyarakat mengenai perlu tidaknya pendidikan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Perbedaan pandangan terjadi sesungguhnya terkait dengan hakekat keberadaan anak berkebutuhan khusus yang dianggap sebagai individu memerlukan layanan pendidikan khusus dan tentu saja berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sebaliknya, anak-anak berkebutuhan khusus sebagaimana anak-anak pada umumnya sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat umum, dengan segala hak yang dimilikinya, maka tidak harus dipisahkan dalam komunitas masyarakatnya, khususnya dalam memperoleh pendidikan. Kauffman, dalam Smith (2006) misalnya, yang mengungkapkan kekhawatirannya mengenai layanan-layanan pengajaran khusus yang dibutuhkan oleh anak-anak yang memiliki hambatan mungkin saja berkurang atau hilang apabila pendidikan reguler menjadi kenyataan.

Direktorat PAUD, menurut Tuti Wahyuti (2007) secara bertahap akan merintis program PAUD Inklusi, ini adalah suatu tahap awal program kegiatan

yang menggembirakan. Setidaknya sudah ada pemikiran dan kemajuan mengenai pendidikan inklusi bagi anak-anak usia dini yang dapat diharapkan untuk terus menuai kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Rintisan awal yang baik berupa pengembangan instrumen deteksi dini (kerjasama dengan Fak Psikologi UI) dan pembentukan center (kerjasama dengan Fak Psikologi UGM) meskipun diperlukan, akan tetapi pada hakekatnya belum secara signifikan menyentuh kebutuhan "pendidikan inklusi" itu sendiri. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan inklusif, beberapa faktor dimaksud menurut Skjorten, Miriam D (2003:52-58) adalah; (1) Kebijakan – hukum- undang-undang – ekonomi, yaitu perlunya ada undang-undang khusus yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, serta dukungan dana dalam implementasinya; (2) Sikap – pengalaman- pengetahuan, yaitu berkenaan dengan pengakuan hak anak serta kemampuan dan potensinya; (3) Kurikulum lokal, regional, dan nasional; (4) Perubahan pendidikan yang potensial, inklusi harus didukung oleh reorientasi di lapangan, dalam bidang pendidikan guru dan penelitian; (5) Kerjasama lintas sektoral; (6) Adaptasi lingkungan, dan (7) Penciptaan lapangan kerja.

Diantara faktor-faktor yang disebutkan di atas, faktor yang terkait dengan kegiatan operasional di lapangan yang sampai saat ini masih rendah, minimnya dukungan fasilitas dan sumber daya yang yang tersedia menjadi kendala dalam implementasi pendidikan inklusi untuk anak-anak usia dini. Padahal regulasi sebagai landasan pelaksanaan dan kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusi sudah banyak diterbitkan. Di Indonesia sendiri pelaksanaan pendidikan inklusif

di sekolah sudah ada landasannya, baik filosofis maupun yuridis-empiris. Secara filosofis, implementasi inklusi mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
- b. Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda
- c. Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua masyarakat dan pemerintah
- d. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak
- e. Setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya

Sedangkan landasan yuridis-empirisnya mengacu pada:

- a. UUSPN No 20 tahun 2003, Pasal 5 Ayat (1), (2)
- b. UUD 1945 pasal 31 ayat (1) & (2). dan (3)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan
- d. Permen Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif
- e. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948
- f. Konvensi Hak Anak, 1989
- g. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990
- h. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang
- i. Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan

- j. Pernyataan Salamanca (1994) tentang Pendidikan Inklusi Komitmen Dakar (2000) mengenai Pendidikan untuk Semua Deklarasi Bandung (2004) & Rekomendasi Bukittinggi (2005) komitmen “pendidikan inklusif”.

Kendati demikian, selama ini masih ada beberapa persoalan prinsip yang menyangkut pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Di satu sisi, sesuai dengan perundangan yang ada pendidikan inklusif hanya berlaku bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Ini juga bisa kita lihat dari beberapa standar pendidikan yang dibuat pemerintah melalui BSNP yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras, yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Padahal, kenyataan di lapangan prevalensi anak-anak berkebutuhan khusus yang berkemampuan intelektual di bawah rata-rata paling banyak diantara jenis-jenis kelainan yang lain (data Dit PSLB, 2005) Sedangkan secara konsep filosofis, sebenarnya inklusi adalah wadah semua anak berkebutuhan khusus, termasuk diantaranya anak-anak yang kemampuan intelektualnya berada di bawah rata-rata.

Apabila kita cermati lagi, bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara eksplisit menyebutkan adanya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah. Pemerintah harus tetap memberi perhatian dan dukungan bagi semua

warganya untuk memperoleh pendidikan yang baik, yang memungkinkan seseorang memperoleh kecerdasan sebagai individu maupun makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pendidikan inklusi membutuhkan dukungan semua pihak, selain pemerintah tentu masyarakat yang terutama dalam konteks ini adalah para praktisi pendidikan, dan juga para orangtua yang punya andil besar dalam mendidik anak-anak usia dini melalui nasehat-nasehat, bimbingan, pengarahan ataupun interaksi yang positif dalam lingkungan keluarga.

Sudah seharusnya, bahwa pendidikan inklusi dapat dimulai sejak anak usia dini. Selain undang-undang dan peraturan yang mendukung terselenggaranya pendidikan anak usia dini, secara konseptual dan kajian-kajian ilmiah mengenai perkembangan anak, telah menunjukkan adanya nilai-nilai positif dalam pemberian layanan pendidikan sejak dini. Fawzia Aswin Hadis (2007) menjelaskan, bahwa diyakini bahwa pengaruh yang paling mengena dan dapat meninggalkan kesan yang lama harus dilakukan pada saat yang tepat yaitu pada masa kritis atau masa sensitif. Perlunya rangsangan diberikan pada usia dini yang dapat meningkatkan seluruh aspek perkembangan juga didasarkan pada pandangan tersebut. Keterlambatan atau pengabaian pemberian rangsangan pada saat yang tepat atau pada periode kritis akan memberi dampak negatif bagi perkembangan anak.

Materi apa yang seharusnya diberikan kepada anak usia dini dalam kelas inklusi? Gould (1999) melihat pendidikan inklusi harus berorientasi pada inisiatif anak sesuai dengan perkembangan dan pendekatan *teacher-directed*. Di sini

diakui, bahwa aktivitas dan intervensi akan memberikan banyak manfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Untuk mencapai tujuan itu, maka harus dipersiapkan guru-guru, therapist, dan orangtua untuk membantu aktivitas semua anak. Program selanjutnya dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam topik kegiatan (1) *circle time*, (2) *art center*, (3) *sand and water center*, (4) *block center*, (5) *dramatic play*, (6) *snack time*, (7) *transitions*, (8) *fine motor center*, and (9) *gross motor center*.

Sekolah Penyelenggara

Apa yang sesungguhnya diharapkan mengenai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, adalah sekolah umum yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan dimaksud diantaranya berkenaan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus, komitmen, manajemen sekolah, sarana prasarana, dan ketenagaan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus haruslah memiliki siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusi, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah. Selain itu juga harus memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, yang didukung dengan adanya fasilitas dan sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Direktorat PSLB (2007) menjelaskan, bahwa *Sekolah Inklusif* adalah *Sekolah biasa yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, Peserta Didik, Tenaga Administrasi dan Lingkungan Sekolah/Masyarakat*).

Selain itu, pada tataran konsep yang berkembang bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga harus menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Berbagai metode, atau strategi belajar sangat mungkin dikembangkan pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, untuk menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan fleksibel. Adanya penghargaan terhadap diri anak, memotivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri anak, dengan menggunakan kata-kata verbal atau isyarat yang baik. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan inklusif, sebagaimana dikemukakan Mirriam (2003), yaitu :

- a. Pengetahuan tentang perkembangan anak
- b. Pemahaman akan kebutuhan dan nilai interaksi komunikasi dan pentingnya dialog di kelas
- c. Pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak berkaitan dengan perkembangan, motivasi dan belajar melalui suatu interaksi positif dan berorientasikan sumber
- d. Pemahaman tentang "Konvensi Hak Anak" dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak
- e. Pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan isi, hubungan sosial, pendekatan dan metode dan bahan pembelajaran
- f. Pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis

- g. Pemahaman pentingnya evaluasi dan asesmen berkesinambungan oleh guru
- h. Pemahaman konsep inklusi dan pengayaan serta cara pelaksanaan inklusi dan pembelajaran yang berdeferensi
- i. Pemahaman terhadap hambatan belajar termasuk yang disebabkan oleh kecacatan fisik atau mental
- j. Pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan implementasi pendekatan dan metode baru.

Kurikulum yang diterapkan, dapat menggunakan kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK) dikembangkan sekolah sesuai dengan standar kompetensi untuk anak-anak normal secara penuh, modifikasi, atau secara khusus dikembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah harus pula mempersiapkan guru pendamping khusus, yang bisa didatangkan dari sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) sebagai sekolah basis, ataupun guru di sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus sebagai guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusif.

Kesimpulan

Sebagai bentuk perkembangan lebih lanjut dari konsep pendidikan terpadu (*mainstreaming*), pendidikan inklusif telah memberikan harapan yang lebih baik dalam upaya memberkan layanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, dalam konteks lingkungan pendidikan reguler. Di sini semua siswa yang masuk

dalam lingkungan sekolah sepenuhnya menjadi anggota komunitas sekolah, dan satu sama lain saling berpartisipasi secara wajar untuk untuk mendapatkan kesempatan dan bertanggung jawab dalam lingkungan pendidikan secara umum.

Kendati sampai saat ini masih terjadi kontroversi mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif. Namun implementasi pendidikan inklusif untuk anak-anak usia dini sudah seharusnya menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun orangtua. Ini mengingat pentingnya intervensi dini pada anak-anak berkebutuhan khusus berkenaan dengan proses perkembangan dan sosialisasi di masyarakat. Dan perlu ditegaskan pula, bahwa kendala utama adalah adanya stigma atau prasangka dari masyarakat tentang adanya hambatan yang mungkin tidak terjadi pada anak-anak yang bersangkutan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak-anak usia dini tetap harus mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif secara umum, yang berkaitan dengan kurikulum, kebijakan, lingkungan, tenaga maupun fasilitasnya yang berorientasi pada kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berorientasi pada perkembangan dan aktivitas anak.

REFERENSI:

- Blackhurst, A. E & Berdine, HW (1981), *An Intruduction to Special Education*, Boston: Little, Brown & Co.
- Direktorat PSLB (2007) *Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (reposisi, redifferensiasi, rebranding)* , materi pengantar, dipresentasikan dalam berbagai program kegiatan Direktorat PSLB
- Fawzia Aswin Hadis (2007), *Fungsi Stimulasi Bagi Perkembangan Anak, Tinjauan Psikologis*, Buletin PADU Vol. 6 No. 3, Desember 2007

Gould, Patti and Joyce Sullivan (1999), *The Inclusive Early Classroom, Easy Ways to Adapt Learning Centers For All Children*, Beltsville, MD: Gryphon House, Inc.

Hallahan, DP & Kauffman, JM (1988), *Exceptional Children, Introduction to Special education, 4 th edition*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Johnson, BH & Skjorten, D Miriam (2003), *Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar, terjemahan*, Bandung: Program Pascasarjana UPI

Kirk, Samuel A & Gallagher (1986), *Educating Exceptional Children*, Boston: Houghton Mifflin company.

O'Neil, John (1994), Can Inclusion Work? A Conversation with Jim Kauffman and Mara Sapon-Shevin, *Educational Leadership*, 1 Desember, 1994.

Polloway, EA & Patto, JR (1993), *Strategies For Teaching Learners With Special Needs*, New York: McMillan Publishing Co.

Smith, David J (2006), *Inklusi, Sekolah Yang Ramah Untuk Semua*, terjemahan, Bandung: Penerbit Nuansa

Tuti Wahyuti (2007), *Pendidikan Inklusif Pada Taman Penitipan Anak Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Buletin PADU Vol. 6 No. 1, April 2007